



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Usulan mantan Kapolri percepat reformasi Polri, Presiden memilih Kapolri tidak perlu libatkan DPR
Tanggal	: Sabtu, 13 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Usulan Mantan Kapolri Percepat Reformasi Polri

Presiden Memilih Kapolri Tidak Perlu Libatkan DPR

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengusulkan, Presiden dalam memilih Kapolri, Tidak lagi melalui proses politik di DPR.

Usulan itu disampaikan Da'i saat bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Menurut Da'i, proses pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden

harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan.

"Tidakkah sebenarnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi oleh Polri itu sendiri? Tidak perlu meminta Kapolri yang dipilih forum politik itu," sambungnya.

Menanggapi usulan itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan ada kemungkinan Presiden bisa memilih

ih langsung Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR agar Kapolri tidak sibuk membahas jasa dia kepentingan ekonomi.

Apalagi, usulan agar Kapolri ditunjuk Presiden sudah banyak bergulir dalam rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama unsur eksternal, termasuk oleh para mantan Kapolri.

Ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengusulkan agar aturan baru tersebut diatur. Temasuk isu polisi jangan sampai

ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. "Supaya dia betul-betul menjadi aparat untuk kepentingan rakyat," imbuh Jimly.

Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Peneliti Imparsial, Riyad Putuhena. Bagi dia, proses pemilihan Kapolri tanpa melibatkan DPR akan menihilkan proses politisasi dalam seleksi Kapolri. "Bisa menghindari politik balas budi antara Kapolri dan DPR," katanya.

Sementara, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra keberatan jika proses penetapan Kapolri tanpa persetujuan DPR. "Melanggar UUD dan perundang undangan," ujar dia.

Untuk melihat lebih jauh, bagaimana pandangan dan komentar Soedeson Tandra dan Riyad Putuhena terkait usulan Kapolri dipilih Presiden tanpa melibatkan DPR, berikut wawancaranya

RIYADH PUTUHENA, Peneliti Imparsial

Bisa Hindari Politisasi Dan Politik Balas Budi



Kami menilai agenda utama reformasi kepolisian seharusnya berfokus pada penguatan kontrol baik internal maupun eksternal yang independen dan efektif.

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR

Amandemen Dulu UUD Dan Tap MPR



Menurut kami, itu tidak menyelesaikan masalah. Presiden meminta kepada tim reformasi Polri itu untuk membentuk dan mencari solusi, bukan malah bikin masalah baru.

Apakah pendapat Anda mengenai usulan penunjukan Kapolri oleh Presiden tidak lagi melalui proses di DPR?

Rencana pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR juga merugikan institusi Polri.

Tapi, apakah proses pemilihan Kapolri tanpa melibatkan DPR internal Kepolisian?

Hal bisa berjalan dan berjalan dengan teman-teman di dalam inelligence oleh anggota DPR yang memiliki kepentingan, sehingga profesionalisme Polri sering terpinggirkan.

Dalam konteks itu, gagasan penunjukan Kapolri sepuhnya menjadi

kepentingan Presiden dapat dijadikan sebagai usaha menyederhanakan proses politik dan menghindari intervensi politik yang berpotensi mengganggu kinerja institusi Polri.

Apakah pemilihan melalui DPR rawan terhadap praktik politik?

Selama ini, mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan praktik politik yang kuat, sehingga sangat berpotensi menciptakan sempat politik halus budi antara Kapolri dan DPR.

Hal bisa berjalan dan berjalan dengan teman-teman di dalam inelligence oleh anggota DPR yang memiliki kepentingan, sehingga profesionalisme Polri sering terpinggirkan.

Rencana ini juga rentan menciptakan situasi executive heavy yang memang terlalu banyak kewenangan pada tem-

bagu eksekutif dalam hal ini Presiden.

Apakah pandangan Anda dalam upaya reformasi Kepolisian?

Kami menilai agenda utama reformasi kepolisian seharusnya berfokus pada penguatan kontrol baik internal maupun eksternal yang independen dan efektif.

DPR belum menjalankan tugasnya dengan baik guna memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Apakah lagi yang menurut Anda perlu dilakukan?

Selain itu, meupatahkan peran Kapolri dalam melaksanakan mekanisme pengawasan etik dan profesional, serta peningkatan akuntabilitas publik melalui lembaga HAM dan mekanisme pengaduan yang transparan adalah keharusan. ■REN

Sebagai anggota Komisi III DPR, apa pandangan Anda dengan munculnya usulan Kapolri dipilih Presiden tanpa melibatkan DPR?

Selama ini, mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan praktik politik yang kuat, sehingga sangat berpotensi menciptakan sempat politik halus budi antara Kapolri dan DPR.

Hal bisa berjalan dan berjalan dengan teman-teman di dalam inelligence oleh anggota DPR yang memiliki kepentingan, sehingga profesionalisme Polri sering terpinggirkan.

Rencana ini juga rentan menciptakan situasi executive heavy yang memang terlalu banyak kewenangan pada tem-

bagu Kapolri dipilih langsung Presiden tanpa persetujuan DPR apakah masalah itu selesai? Kan tidak.

Penunjukan Kapolri melalui DPR dan melalui perpanjangan pertemuan antar Kapolri dan Presiden tidaklah benar.

Kapolri dipilih oleh Presiden dengan perpanjangan DPR itu agar fungsi legislasi yakni fungsi pengawasan itu berjalan.

Ada tindungan jika Kapolri ditetapkan oleh DPR terjadi sumber politik. Apa pendapat Anda?

Begitu. Calon Kapolri yang diusulkan ke DPR biasanya hanya satu orang. Jadi, tidak ada tindakan tiga calon Kapolri. Dan sebenarnya Presiden sudah menunjuk Kapolri, ini satu nama saja. Kalau bahwa Inggris itu *take it or leave it*.

Dan ketika Presiden menetapkan satu

namanya dan usulannya tidak diakui dan tidak disenggut oleh DPR? Kan tidak. Jadi, menurut kami, ide dasar dari aturan di mana Kapolri diangkat ditentukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR itu dalam rangka *check and balance*.

Menurut Anda, apakah usulan tersebut tidak perlu diperlumbang-kat?

Menurut kami, itu tidak menyelesaikan masalah. Presiden meminta kepada tim reformasi Polri itu untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan institusi Polri.

Kalau misalnya usulan itu bertabrakan dengan dengan aturan perundang-undangan pastilah Presiden nggak mungkin melakukannya, karena kalau dilakukan melanggar konstitusi. ■REN